

PENGARUH PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA, PENGAWASAN PREVENTIF, PENGAWASAN DETEKTIF TERHADAP EFEKTIVITAS PENGENDALIAN ANGGARAN

Astri Novita

astrinovita27@gmail.com

Nur Handayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This study aims to test the impact of the performance based budgeting, the preventive supervision, and the detective supervision toward the effectivity of the budgeting control in the regional apparatus organization of Surabaya. The type of this study is a quantitative research . The samples of this study are collected by applying the purposive sampling , that is collecting samples based on the determined criteria. Based on that method , there are 130 samples from 26 organizations. However, the returned and the appropriate questionnaires are 125. The method of this analysis is the multiple linear regression . The analisis yang digunakan adalah analisis regresi tinier berganda . The data processing of this study applies SPSS version 23. The result of this study shows that the performance based budgeting does not impact the effectivity of the budgeting control since the performance based budgeting arrangement is less appropriate with the vision, mission , and the strategical plans or the determined goals of the agencies. The preventive and the detective supervision give positive and significant impact to the effectivity of the budgeting control. It shows, the higher level of the preventive and the detective supervision, the effectivity of the budgeting control in the regional apparatus organizations of Surabaya will be higher as well.

Keywords: the performance based budgeting, the preventive supervision, the detective supervision, the effectivity of the budgeting control.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penganggaran berbasis kinerja, pengawasan preventif, dan pengawasan detektif terhadap efektifitas pengendalian anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu pemilihan sampel dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan metode purposive sampling tersebut didapatkan sebanyak 130 sampel dari 26 Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya. Tetapi kuisioner yang kembali dan layak diolah sebanyak 125 kuisioner. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian adalah program SPSS versi 23. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penganggaran berbasis kinerja tidak berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran dikarenakan kurang sesuai penyusunan anggaran berbasis kinerja dengan visi, misi, serta rencana strategis atau tujuan dari instansi tersebut yang sudah ditetapkan. Pengawasan preventif dan pengawasan detektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas pengendalian anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengawasan preventif dan pengawasan detektif maka efektifitas pengendalian anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya juga meningkat.

Kata kunci : penganggaran berbasis kinerja, pengawasan preventif, pengawasan detektif, efektifitas pengendalian anggaran

PENDAHULUAN

Dalam suatu pemerintahan pasti mempunyai tujuan dalam pencapaian tatanan anggaran yang baik dan tepat. Indonesia telah memasuki masa pemulihan akibat adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan. Setiap daerah diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola sumber-sumber keuangan setiap daerah untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah daerah akan mengelola dan melakukan pembaharuan sistem

keuangan daerah yang berdasar pada sektor publik dan mengarahkan pemerintah melakukan pemerintahan berdasarkan praktik keuangan yang sehat dan bersih.

Kondisi ini mendorong organisasi publik untuk dapat mengelola jasa pelayanan publik secara baik dan bertanggungjawab. Dalam organisasi diperlukan pengelolaan yang profesional, karena *value for money* (*efectifity, efficiency, economy*) berorientasi pada organisasi sektor publik dimana profesionalitas dibutuhkan dalam pengelolaan sebuah organisasi. Apabila dapat dikelola secara baik dan bertanggungjawab, maka organisasi publik akan memberikan kontribusi pemasukan kepada kas daerah, yang nantinya akan menjadi sebuah sumber pendapatan asli daerah (PAD) (Mardiasmo, 2004).

Pada prinsipnya anggaran digunakan sebagai pedoman kerja, pengorganisasian kerja, dan pengawasan kerja (Munandar, 2001:10). Semestinya masyarakat dapat mengetahui anggaran yang sudah direalisasikan secara terbuka agar perekonomian masyarakat berkembang dan tercipta pembangunan yang sesuai sasaran. Pemerintah harus menerapkan sistem dan pelaksanaan pengawasan yang efektif dan efisien agar mampu mendeteksi adanya suatu kesalahan, kebocoran, dan kegagalan yang dapat menimbulkan kerugian pada anggaran pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Menurut Pratama (2014) anggaran berbasis kinerja dapat tercapai apabila telah sudah ditetapkannya suatu target atau tujuan dalam pencapaiannya agar anggaran berbasis kinerja dapat tepat pada sasaran. Dalam mempertimbangkan alat untuk pencapaian, menetapkan indikator, dan melakukan analisis biaya manfaat merupakan sistem pada penganggaran berbasis kinerja dalam pengelolaan anggaran untuk menspesifikasikan target yang akan dicapai. Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja didasarkan pada target kinerja yang ingin dicapai. Target kinerja tersebut diuraikan dalam bentuk indikator kinerja yang merupakan target prestasi kerja dari pengelola anggaran.

Dibidang pengelolaan keuangan daerah terhadap aparat yang bertugas mengawasi jalannya anggaran terdapat aparat yang kompeten. Untuk mendapatkan aparat yang kompeten maka pemerintah sebagai pembuat kebijakan, memegang peranan yang penting dalam membina serta mengawasi jalannya anggaran dengan membentuk peraturan perundang-undangan. Pembinaan dilakukan pemerintah dengan memberikan, pelatihan, pengarahan, pedoman, bimbingan, supervisi serta evaluasi untuk menyiapkan aparat pengawasan yang kompeten (PP Nomor 20 Tahun 2001).

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. Pengawas pelaksanaan anggaran diawasi oleh satuan unit pelaksanaan anggaran, baik pada saat realisasi anggaran maupun setelah realisasi anggaran (Permendagri Nomor 71 Tahun 2010). Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang proses pelaksanaannya secara berkesinambungan atau terus-menerus untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap dilaksanakannya suatu kegiatan agar dapat dicegah sebelum terjadinya penyimpangan tersebut terjadi.

Pengawasan bertujuan untuk menjaga agar rencana itu dalam realisasinya tetap terarah sesuai tujuan yang telah ditentukan dan sesuai dengan peraturan. Pengawasan merupakan bagian dari pengendalian, adanya kelemahan pada pengawasan akan menghasilkan pelaksanaan dari realisasi anggaran tidak optimal (Widjaja, 2002:94). Berdasarkan sifatnya pengawasan dibagi menjadi pengawasan preventif dan pengawasan detektif

Pengawasan preventif merupakan suatu bentuk pengawasan yang dilakukan sebelum dilaksanakannya suatu kegiatan atau sebelum terealisasinya suatu kegiatan

(Revrison, 2000). Pada dasarnya pengawasan preventif dilakukan sebagaimana mungkin untuk mencegah terjadinya suatu penyimpangan-penyimpangan yang kemungkinan akan terjadi dalam kegiatan tersebut. Pengawasan preventif penting untuk dilakukan karena pengawasan preventif ini dapat mencegah timbulnya suatu permasalahan atau dapat menghindari adanya suatu penyimpangan sebelum terlaksananya sebuah kegiatan.

Setelah pengawasan preventif dilaksanakan maka pemerintahan ditugaskan kembali untuk mengawasi anggaran yang sudah disusun dan akan melakukan pengecekan untuk mengoreksi bahwa anggaran telah berjalan sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya dalam kegiatan, dan menjamin anggaran tepat pada sasaran dan mengidentifikasi kesalahan atau penyelewengan anggaran yang mungkin akan terjadi, hal ini disebut dengan pengawasan detektif.

Menurut Revrison (2000), pengawasan detektif adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban bendaharawan. Porter (1992) mengatakan pengawasan detektif biasanya dilakukan setelah dilakukannya kegiatan, yaitu dengan membandingkan antara hal yang terjadi dengan hal yang seharusnya terjadi. Pengawasan detektif dimaksudkan untuk mengetahui apakah kegiatan dan pembiayaan yang telah ditentukan itu telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pengawasan menurut teori dilakukan dengan memeriksa seluruh dokumen yang ada, dan tentu saja hal itu dilakukan setelah anggaran dipakai, dan digunakan, yang mana pengawasan ini bertujuan memeriksa apakah penggunaan anggaran telah digunakan dengan efektif dan sesuai dengan ketetapan. Semakin bagus pengawasan detektif maka semakin baik pula pengendalian anggarannya. Jadi pengawasan detektif berpengaruh signifikan terhadap efektifitas pengendalian anggaran.

Mardiasmo (2004), menjelaskan efektivitas merupakan suatu ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Dan efektivitas pengendalian terhadap anggaran dapat meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan dalam suatu anggaran.

Berdasarkan yang dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka dirumuskan sebagai berikut : (1) Apakah penganggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran?, (2) Apakah pengawasan preventif berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran?, (3) Apakah pengawasan detektif berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran?. Dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk menguji apakah penganggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran, (2) Untuk menguji apakah pengawasan preventif berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran, (3) Untuk menguji apakah pengawasan detektif berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Keagenan (*Teory Agency*)

Teori keagenan menjelaskan tentang dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan yaitu prinsipal dan agen. Yang dimaksud sebagai prinsipal adalah masyarakat yang memiliki hak untuk meminta pertanggung jawaban pemerintah sebagai pihak pemegang wewenang. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal (Ichsan, 2013).

Teori keagenan muncul akibat adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen sehingga timbul suatu konflik. Konflik kepentingan antara prinsipal dan agen terjadi berdasarkan asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh

kepentingan dirinya sendiri. Hubungan masyarakat dengan pemerintah dapat dikatakan sebagai hubungan keagenan karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh masyarakat (prinsipal) yang menggunakan pemerintah (agen) untuk menyediakan jasa yang menjadi kepentingan masyarakat (Jensen dan Meckling, 1976).

Penganggaran Berbasis Kinerja

Penganggaran berbasis kinerja adalah sebuah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi (Bastian, 2006:171). Dimana pemerintah daerah dalam melaksanakan seluruh kegiatannya harus berdasarkan atas visi, misi, dan rencana dalam pencapaian tujuan tersebut.

Anggaran merupakan rencana jangka pendek yang disusun secara sistematis berdasarkan rencana jangka panjang yang telah ditetapkan sebelumnya dan digunakan sebagai dasar pengawasan keuangan perusahaan untuk periode mendatang. Anggaran digunakan sebagai sarana perencanaan berupa pengeluaran dan pendapatan pada masa yang akan datang, pada umumnya disusun dalam satu tahun. Anggaran juga dapat berfungsi sebagai alat kontrol atau alat pengawasan baik terhadap pengeluaran maupun pendapatan pada masa yang akan datang (Supriyono, 1990).

Dengan demikian suatu sistem administrasi publik yang telah ditata dengan baik, konsisten, dan terstruktur sehingga kinerja anggaran dapat dicapai berdasarkan ukuran yang telah ditetapkan diperlukan dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja (Baskara, 2017).

Pengawasan

Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2005 Pasal 1 tentang Pedoman, Pembinaan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Baswir (2002:118), pengawasan secara umum adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah direncanakan.

Keputusan Menteri Keuangan No. 152 tahun 2011 menjelaskan bahwa pengawasan menurut sifatnya dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu Pengawasan Preventif, pengawasan yang dilakukan sebelum dimulainya pelaksanaan suatu kegiatan, atau sebelum terjadinya pengeluaran keuangan negara. Dan Pengawasan detektif, pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban, biasanya dilakukan setelah dilakukannya kegiatan.

Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana yaitu sebelum terlaksanakannya kegiatan disusunlah sebuah rencana untuk pelaksanaan kegiatan tersebut agar kegiatan tersebut berjalan sesuai tujuan pelaksanaan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaan.

Menurut Revrisond (2000:120), pengawasan preventif pada dasarnya adalah pengawasan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan preventif merupakan pengawasan sebelum dilaksanakannya suatu kegiatan, atau sebelum terjadinya pengeluaran keuangan negara. Widjaja (2002:95) mengatakan pengawasan preventif ini biasanya berbentuk prosedur-prosedur yang harus di tempuh dalam melaksanakan kegiatan. Pengawasan preventif pada umumnya tidak dilakukan oleh unit-unit pengawasan yang telah ditetapkan. Tujuan pengawasan preventif terutama untuk mencegah terjadinya penyimpangan pada pelaksanaan anggaran.

Pengawasan Detektif

Pengawasan detektif dilakukan setelah dilakukannya kegiatan, yaitu dengan membandingkan antara hal yang sudah direncanakan dengan hal yang seharusnya terjadi. Pengawasan detektif merupakan suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban bendaharawan. (Baswir, 2000).

Revrisond (2000) mengatakan bahwa pengawasan detektif merupakan salah satu aspek yang mendukung untuk terlaksananya pengendalian yang efektif. Dan pengawasan detektif juga mencakup aspek pengendalian dan pemeriksaan yang dilakukan pihak atasan terhadap bawahan.

Efektivitas Pengendalian Anggaran

Efektivitas pengendalian anggaran adalah berhasil atau tidaknya tujuan dari pengendalian terhadap anggaran tersebut dilaksanakan. Efektivitas sendiri adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya (Mardiasmo, 2004:134). Efektivitas pengendalian merupakan suatu tujuan yang ingin dicapai dari fungsi anggaran sebagai alat pengendalian.

Sistem Pengendalian Internal (SPIP) merupakan pedoman yang digunakan dalam pelaksanaan pengendalian atas penyelenggaraan suatu kegiatan pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah. Untuk tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai sebagai dasar pedoman (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008).

Pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran dilakukan dengan tujuan menjamin agar pengumpulan penerimaan negara dan penyaluran pengeluaran-pengeluaran negara. Agar tidak terjadi penyimpangan dari rencana yang telah digariskan dalam anggaran negara. Pengendalian pada anggaran merupakan suatu proses untuk memastikan bahwa anggaran sampai hal yang spesifik dilaksanakan secara tepat dan efisien (Baswir, 2000:118).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran

Proses penyusunan anggaran dalam berbasis kinerja dimulai dari satuan kerja yang ada di pemerintah daerah, melalui dokumen usulan anggaran yang dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RK SKPD) Penganggaran berbasis kinerja mendorong partisipasi dari pemerintah sehingga tujuan pencapaian hasil sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Legislatif diberi kesempatan untuk berperan aktif dalam penyusunan dan penetapan anggaran sebagai produk hukum. Lebih lanjut Mardiasmo (2004:31) menjelaskan anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi, yaitu alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi, dan alat menciptakan ruang publik. Sebagai alat perencanaan, anggaran merupakan rencana terperinci atas pendapatan dan pengeluaran yang akan dilakukan pemerintah daerah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Berdasarkan penjelasan diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Baskara (2017) dengan hasil menunjukkan bahwa penganggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian anggaran. Berdasarkan paparan tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap efektivitas pengendalian anggaran

Pengaruh Pengawasan Preventif Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran

Pengawasan preventif dilakukan pemerintah untuk menghindari adanya penyimpangan dalam pelaksanaan keuangan daerah yang akan membebankan dan merugikan pemerintah daerah lebih besar. Sehingga anggaran yang telah ditetapkan dapat diawasi penggunaannya sesuai dengan peruntungannya dan tidak terjadi lagi dana-dana yang terbuang dan tidak terserap secara penuh. Jadi pengawasan preventif sangat berhubungan secara signifikan terhadap efektifnya suatu anggaran. Semakin bagus pelaksanaan pengawasan preventif yang dilakukan maka semakin bagus pula pengendalian anggaran tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fuadi (2013) dengan hasil menunjukkan bahwa pengawasan preventif berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian anggaran. Berdasarkan paparan tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₂: Pengawasan preventif berpengaruh positif terhadap efektivitas pengendalian anggaran

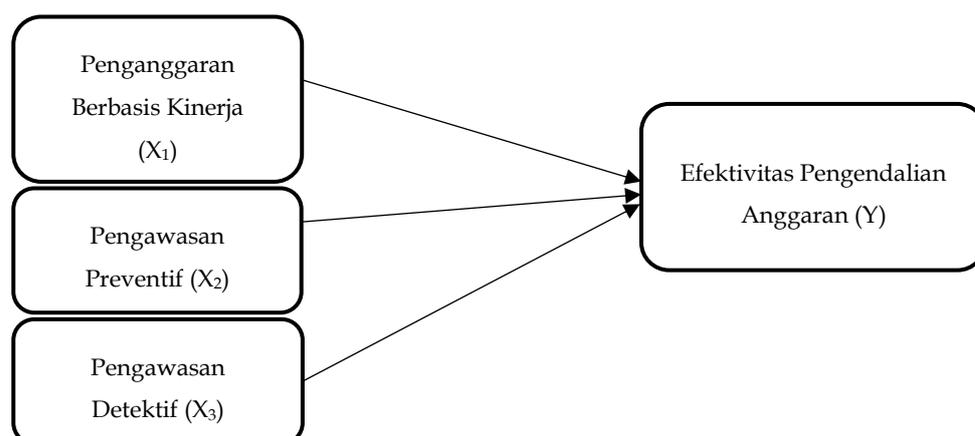
Pengaruh Pengawasan Detektif Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran

Baswir (2000:123) mengatakan pengawasan detektif adalah bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban, yang biasanya dilaksanakan setelah dilakukan suatu kegiatan. Pengawasan detektif sesungguhnya mencakup aspek pengendalian dan pemeriksaan yang dilakukan pihak atasan terhadap bawahan. Jadi, pengawasan detektif merupakan salah satu aspek yang mendukung untuk terlaksananya 21 pengendalian yang efektif. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan pengawasan detektif antara lain Baskara (2017) meneliti pengaruh pengawasan preventif, pengawasan detektif, dan penganggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas pengendalian anggaran pada SKPD Kota Dumai. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengawasan detektif dalam efektivitas pengendalian anggaran pada SKPD Kota Dumai. Berdasarkan paparan tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Pengawasan detektif berpengaruh positif terhadap efektivitas pengendalian anggaran

Rerangka Konseptual

Model penelitian dalam penelitian ini adalah :



Gambar 1.
Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (objek) penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sugiyono (2017:14) mengatakan metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan penelitian yang menekankan pada pengujian. Penelitian ini merupakan penelitian survey yaitu dengan penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat untuk mengumpulkan data yang pokok. Penelitian ini dirancang sebagai penelitian explanatory yang bertujuan untuk mengetahui serta menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pengendalian anggaran.

Populasi dalam penelitian ini adalah kepala Dinas/Badan, Kabid/Kabag, Kasubid/Kasubbag/Kasubdis, staf bagian akuntansi/keuangan dan staf Inspektorat pengawasan Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya. Objek penelitian yang dijadikan populasi yaitu Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya yang meliputi Dinas, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Inspektorat Daerah.

Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomer 14 Tahun 2016 bahwa jumlah OPD Kota Surabaya adalah 60 OPD yang terdiri dari 1 Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat DPRD, 1 Inspektorat Daerah, 22 Dinas Daerah, 4 Badan Daerah, dan 31 Kecamatan Daerah Kota Surabaya. Pengambilan sampel atas responden dilakukan secara purposive sampling. Purposive sampling yaitu cara penentuan sampel dengan cara pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel (Sugiyono, 2012:126). Sampel dapat dipilih dengan kriteria tertentu sampel dapat mendukung dalam penelitian ini. Kriteria yang ditentukan dalam penelitian ini adalah : (1) Memiliki masa kerja minimal satu tahun atau lebih, (2) Memiliki jabatan sebagai kepala Dinas/Badan, (3) Memiliki jabatan Kabid/Kabag, (4) Memiliki jabatan sebagai Kasubid/Kasubbag/Kasubdis, (5) Memiliki jabatan sebagai staf bagian akuntansi/keuangan Berdasarkan pertimbangan yang terlibat dalam penyusunan anggaran di lingkungan OPD Kota Surabaya. Sehingga dari kriteria yang telah ditetapkan populasi dalam penelitian sebanyak 20 Dinas, 4 Badan, 1 Satuan Polisi Pamong Praja dan 1 Inspektorat di Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan seseorang, bukan penelitian melakukan studi mutakhir (Sekaran, 2006). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuisisioner (angket) yang merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2012:199). Dan kuisisioner diambil kembali oleh peneliti dengan waktu yang telah dijanjikan responden. Dalam penelitian ini menggunakan sumber kuisisioner (BPKP, 2005; Peraturan Kemenkeu No. 152 tahun 2011; Widjaja, 2004) dengan skala likert 1-5 yaitu Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS).

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016:38). Pada penelitian ini terdapat

dua jenis variabel, yaitu variabel independen yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Sedangkan variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel independen atau bebas (Sugiyono, 2016:39). Variabel independen dalam penelitian ini adalah penganggaran berbasis kinerja, pengawasan preventif, dan pengawasan detektif. Sedangkan variabel dependen adalah efektivitas pengendalian anggaran. Pengukuran dimensi atau indikator variabel digunakan Skala Likert.

Penganggaran Berbasis Kinerja

Penganggaran berbasis kinerja yaitu sebuah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi. Dengan demikian penyusunan anggaran berbasis kinerja membutuhkan suatu sistem administrasi publik yang telah ditata dengan baik, konsisten dan terstruktur sehingga kinerja anggaran dapat dicapai berdasarkan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan skala likert 5 alternatif jawaban.

Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum dimulainya pelaksanaan suatu kegiatan, atau sebelum terjadinya pengeluaran Keuangan negara. Pengawasan preventif ini biasanya berbentuk prosedur-prosedur yang harus ditempuh dalam sebelum melaksanakan suatu kegiatan. Prosedur-prosedur yang dalam kegiatan pemerintahan terdapat dalam peraturan pemerintah tentang sistem pengendalian internal. Pengawasan Preventif dilakukan oleh atasan pada OPD, yaitu Kepala Kantor dan Kepala Dinas.

Pengawasan Detektif

Pengawasan detektif yaitu salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban bendaharawan. Pengawasan detektif biasanya dilakukan setelah terlaksananya kegiatan, yaitu dengan cara membandingkan antara kegiatan 27 yang sudah direncanakan dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan, serta untuk mengetahui apakah kegiatan dan pembiayaan yang telah ditentukan itu telah sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Efektivitas Pengendalian Anggaran

Arti Efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Jadi, pengendalian anggaran yang efektif adalah yang dapat mencapai tujuan dari pengendalian anggaran tersebut. Pengendalian anggaran berhubungan dengan upaya yang dilakukan agar pengeluaran aktual sejalan dengan jumlah yang dianggarkan dan bahwa tujuan dan tingkat aktivitas yang dicantumkan dalam anggaran tercapai.

Teknik Analisis

Data Teknik analisis data merupakan suatu metode atau cara yang digunakan untuk menganalisis data dalam rangka memecahkan masalah maupun pengajuan hipotesis agar mudah dibaca dan diinterpretasikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode analisis dimana perhitungan menggunakan SPSS (Statistical Product and Service Solition). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda yang digunakan dalam untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh penganggaran berbasis kinerja, pengawasan preventif dan pengawasan detektif terhadap efektivitas pengendalian anggaran.

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberi suatu gambaran tentang demografi responden penelitian seperti pendidikan, jenis kelamin, usia, latar belakang pendidikan dan masa kerja yang termasuk dalam data demografi. Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpulkan sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2017:147).

Uji Kualitas Data

Penelitian ini menggunakan data yang berupa kuesioner. Suatu kuisisioner dikatakan baik apabila memenuhi dua syarat yaitu valid dan reliable. Untuk mengetahui data yang akan dihasilkan dapat akurat, dipercaya, dan diandalkan sehingga penelitian ini dapat diterima, maka akan dilakukan uji validitas dan uji reabilitas.

Uji Validitas

Uji Validitas adalah sebuah uji yang digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner agar data yang diperoleh relevan. Kuesioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk menyatakan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi validitas ingin mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah dibuat dapat mengukur apa yang hendak diukur. Pengujian validitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu korelasi Pearson. Signifikansi Korelasi Pearson yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka pertanyaan tersebut tidak valid dan apabila nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka pertanyaan tersebut valid (Ghozali, 2016).

Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2018). Kuesioner dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban Seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas diukur dengan uji 30 statistik *Cronbach Alpha*. Suatu variabel atau konstruk dikatakan reliabel apabila memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,60 (Ghozali, 2018).

Uji Asumsi Klasik

Hal yang dilakukan terlebih dahulu sebelum menganalisis regresi linier berganda yaitu melakukan uji asumsi klasik. Sebelum melakukan pengujian terhadap hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas untuk mengetahui metode statistik yang akan digunakan.

Uji normalitas dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk menguji normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogrov-Smirnov. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas ada jika nilai Signifikansi > 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal dan jika nilai Signifikansi < 0,05 maka data tersebut berdistribusi tidak normal (Ghozali, 2018).

Uji multikolinieritas dilakukan bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen. Untuk menguji adanya multikolinieritas dapat dilihat dari *tolerance value* dan *variance inflation factor* (VIF). Model regresi dikatakan bebas multikolinieritas jika nilai *tolerance* jika (lebih besar) > 0,10 atau sama dengan nilai VIF (kurang dari) < 10 (Ghozali 2018).

Uji Heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual pada suatu pengamatan lain. Dalam uji ini apabila tingkat signifikan (lebih besar) $> 5\%$ maka tidak terjadi gejala heterokedastisitas tetapi apabila tingkat signifikan (kurang dari) $< 5\%$ maka terjadi gejala heterokedastisitas. Sedangkan model regresi yang baik adalah tidak terjadi gejala heterokedastisitas.

Uji Autokorelasi menurut Ghozali (2016) untuk mendeteksi adanya autokorelasi yaitu dengan cara menggunakan uji Durbin-Watson (D-W test). Uji ini digunakan untuk melihat apakah terjadi autokorelasi atau tidak didasarkan pada nilai Durbin-Watson. Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut: (1) Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif, (2) Angka D-W di antara -2 dan +2 berarti tidak ada autokorelasi, (3) Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

Analisis Regresi Linear Berganda

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linear berganda yang biasanya digunakan untuk memperhatikan dan meramalkan suatu nilai dalam hubungannya dengan variabel yang lain yang diketahui melalui garis persamaan regresinya, model regresi berganda ini bertujuan untuk mengestimasi rata-rata populasi dan nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui besarnya (Ghozali, 2016). Persamaan regresi yang digunakan adalah:

$$EPA = \alpha + \beta_1PBK + \beta_2PP + \beta_3PD + e$$

Keterangan :

EPA : Efektivitas Pengendalian Anggaran

A : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien Regresi

PBK : Penganggaran Berbasis Kinerja

PP : Pengawasan Preventif

PD : Pengawasan Detektif

e : Koefisien *Error*

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji Kelayakan Model (Uji F) digunakan untuk menguji apakah terdapat pengaruh signifikan pada model penelitian yang layak untuk diuji (Ghozali, 2018). Adapun kriteria pengujian untuk mengambil keputusan pada uji kelayakan model (*Goodness of Fit*) antara lain adalah (a) Jika *goodness of fit statistic* $> (\alpha) 0,005$ maka model regresi yang dihasilkan tidak baik (tidak layak) maka tidak dapat digunakan untuk analisis selanjutnya, (b) Jika *goodness of fit statistic* $0,05 \leq$ maka, H_0 diterima yang berarti bahwa secara individual variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen; b) Jika nilai signifikan uji $t < 0,05$ maka, H_0 ditolak yang berarti bahwa secara individual variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018)

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Apabila nilai R^2 mendekati 0 menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen mengalami keterbatasan. Sedangkan nilai R^2 yang memiliki nilai 1 atau mendekati 1 menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2018).

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji Hipotesis (Uji t) digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh pada setiap variabel independen yang digunakan secara individual dalam menjelaskan variabel dependen. Adapun kriteria pengujiannya dengan tingkat *level of significant* $\alpha = 5\%$ adalah sebagai berikut: (a) Jika nilai signifikan uji $t > 0,05$ maka, H_0 diterima yang berarti bahwa secara individual variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen; (b) Jika nilai signifikan uji $t < 0,05$ maka, H_0 ditolak yang berarti bahwa secara individual variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Penelitian ini terdapat kuesioner yang berisikan sejumlah pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan masing-masing variabel yang telah ditentukan yaitu penganggaran berbasis kinerja, pengawasan preventif, pengawasan detektif dan efektivitas pengendalian anggaran. Variabel-variabel tersebut masing-masing pernyataannya menggunakan dalam bentuk skala likert, baik pada variabel independen maupun variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini.

Hasil pengujian statistik deskriptif pada Tabel 1 menunjukkan variabel Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) memiliki nilai minimum 2,67, nilai maksimum r 4,83, mean 3,6098 dan standart deviation 0,41880. Artinya nilai mean mengindikasikan bahwa jawaban responden pada variabel penganggaran berbasis kinerja relatif homogen atau baik. Variabel Pengawasan Preventif (PP) menunjukkan nilai minimum 1,67, nilai maksimum r 4,83, mean 3,5666 dan standart deviation 0,47557. Artinya nilai mean mengindikasikan bahwa jawaban responden pada variabel pengawasan preventif relatif homogen atau baik. Variabel Pengawasan Detektif (PD) menunjukkan nilai minimum 2,71, nilai maksimum r 5,00, mean 3,8114 dan standart deviation 0,46095. Artinya nilai mean mengindikasikan bahwa jawaban responden pada variabel pengawasan detektif relatif homogen atau baik. Variabel Efektivitas Pengendalian Anggaran (EPA) menunjukkan nilai minimum 2,75, nilai maksimum r 5,00, mean 3,9920 dan standart deviation 0,50195. Artinya nilai mean mengindikasikan bahwa jawaban responden pada variabel efektivitas pengendalian anggaran relatif homogen atau baik.

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Min	Maks	Mean	Std. Deviation
PBK	125	2,67	4,83	3,6098	0,41880
PP	125	1,67	4,83	3,5666	0,47557
PD	125	2,71	5,00	3,8114	0,46095
EPA	125	2,75	5,00	3,9920	0,50195
Valid N (listwise)	125				

Sumber: Data Kuesioner diolah, 2021

Uji Validitas

Hasil uji validitas dari variabel pengawasan preventif, pengawasan detektif, dan penganggaran berbasis dapat dikatakan valid, karena dari *degree of freedom* (df) = $N-2$ jadi $125-2 = 123$ dengan taraf signifikan $\alpha=5\%$, maka r_{tabel} dalam penelitian ini adalah 0,1757. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ yakni $r_{hitung} > 0,1757$.

Uji Realibilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan reliabel atau handal. Uji reliabilitas diukur dengan menggunakan program SPSS. Dalam pengukuran

ini menggunakan *one shot methods* atau metode pengukuran sekali. Berikut terdapat Tabel 2 yang menyajikan hasil dari uji reliabilitas :

Tabel 2
Hasil Uji Reabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Koefisien Alpha (α)	Keterangan
Penganggaran Berbasis Kinerja	0,740	0,6	Reliabel
Pengawasan Preventif	0,726	0,6	Reliabel
Pengawasan Detektif	0,748	0,6	Reliabel
Efektifitas Pengendalian Anggaran	0,659	0,6	Reliabel

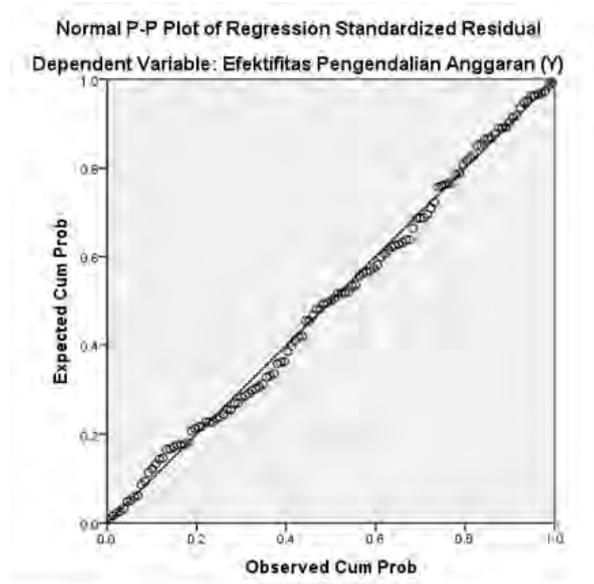
Sumber: Data Kuesioner diolah, 2021

Berdasarkan pada Tabel 2, dapat disimpulkan bahwa semua variabel mempunyai nilai *Cronbach Alpha* diatas 0,60. Sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukuran masing-masing variabel dari kuisisioner yang diberikan kepada responden dinyatakan reliabel dan konsisten.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Model regresi yang baik adalah yang mempunyai distribusi yang normal atau mendekati normal, dapat diuji dengan pendekatan grafik yaitu dengan grafik *Normal P-P Plot of regression standart*, dengan adanya pengujian ini diisyaratkan bahwa distribusi data penelitian harus mengikuti garis diagonal antara 0 dan pertemuan sum X dan Y. Berikut ini adalah gambar hasil grafik dari uji normalitas :



Gambar 2
Hasil SPSS Grafik Normal P-P Plot
Sumber: Data Kuesioner diolah, 2021

Berdasarkan pada gambar *Normal P-P Plot of regression standart* diatas dapat dilihat bahwa titik-titik yang menyebar pada sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Uji normalitas tidak hanya dilihat dari *Normal P-P Plot of regression standart* saja namun dapat dilihat dari perhitungan statistic dengan uji statistik non-parametik *Kolmogrov-Smirnov* (K-S). Jika hasil *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikansi diatas 0,05 maka *data residual*

mendistribusikan dengan normal. Sedangkan jika hasil Kolmogrov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi dibawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal.

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		125
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.33156083
Most Extreme Differences	Absolute	.042
	Positive	.042
	Negative	-.035
Test Statistic		.042
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data Kuesioner diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 3, menunjukkan bahwa hasil uji normalitas data dengan Kolmogrov-Smirnov (K-S) dalam penelitian ini berdistribusi normal serta memenuhi asumsi normalitas residual dapat dilihat dari nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* yang lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,200 sehingga model regresi layak untuk digunakan.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya multikolinieritas pada suatu korelasi yang signifikan diantara variabel independen dan satu variabel lainnya. Apabila nilai *tolerance* mendekati 1, serta nilai VIF disekitar angka 1 serta tidak lebih dari 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas antara variabel bebas dalam model regresi. Berikut adalah tabel dari hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada perhitungan statistic sebagai berikut :

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinieritas

Collinearity Statistics		
Model	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
PBK	0,872	1,147
PP	0,774	1,292
PD	0,813	1,229

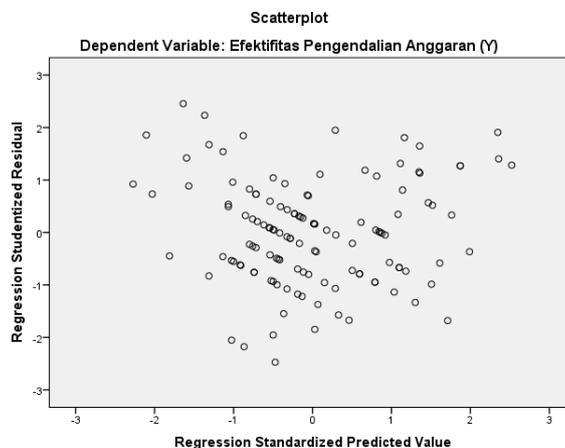
a. Dependent Variable: EPA

Sumber: Data Kuesioner diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 4 diatas menunjukkan bahwa nilai Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), Pengawasan Preventif (PP), dan Pengawasan Detektif (PD) < 10 dan nilai tolerance > 0,1, maka telah disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi multikolinieritas atau tidak terjadi kolerasi antara variabel dependen dan telah memenuhi asumsi uji multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas merupakan uji yang bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah regresi terjadi perbedaan varians residual dari pengamatan yang satu ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2016). Untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat gambar hasil *output* SPSS berikut ini :



Gambar 3
Uji Heterokedastisitas
Sumber: Data Kuesioner diolah, 2021

Tabel 5
Perhitungan Uji Glejser

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,279	0,181		1,447	0,142
PBK	-0,036	0,040	-0,087	-0,900	0,370
PP	0,060	0,044	0,141	1,380	0,170
PD	-0,029	0,039	-0,074	-0,739	0,462

a. Dependent Variable: ABS_Res
Sumber: Data Kuesioner diolah, 2021

Berdasarkan pada Gambar 5, menunjukkan bahwa scatter plot tersebut dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik-titiknya menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas. Dan pernyataan tersebut diperkuat oleh adanya perhitungan uji heteroskedastisitas pada Tabel 5 menggunakan Uji Glejser. Dalam perhitungan Uji Glejser diketahui bahwa nilai probabilitas $> 0,05$. Sehingga disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada penelitian ini.

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertugas untuk menguji apakah model regresi linear berganda terdapat korelasi antara kesalahan penggunaan pada periode t dengan kesalahan penggunaan pada periode t-1 atau sebelumnya (Ghozali, 2016).

Tabel 6
Uji Autokorelasi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,960	0,321		2,991	0,003
PBK	0,124	0,068	0,141	1,833	0,069
PP	0,275	0,074	0,302	3,694	0,000
PD	0,290	0,067	0,348	4,362	0,000

Sumber: Data Kuesioner diolah, 2021

Berdasarkan pada Tabel 6 diatas menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,217. Dinyatakan tidak ada autokorelasi apabila angka D-W terletak diantara -2 sampai +2. Pada penelitian ini nilai Durbin-Watson adalah $-2 < 1,217 < 2$. Maka dari data diatas dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi.

Analisis Linier Berganda

Pada penelitian ini pengujian menggunakan teknik analisis regresi linier berganda yaitu untuk mengetahui pengaruh variable independen (penganggaran berbasis kinerja, pengawasan preventif, pengasawasan detektif) terhadap variabel dependen (efektivitas pengendalian anggaran).

Tabel 7
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
0,611 ^a	0,373	0,358	0,33565	1,217 ^a

a. Dependent Variable: EPA

Sumber: Data Kuesioner diolah, 2021

Dari hasil data pada Tabel 7 diketahui uji regresi linier berganda diperoleh hasil sebagai berikut:

$$EPA = 0,960 + 0,124 PBK + 0,275 PP + 0,290 PD + e$$

Berikut ini merupakan hasil persamaan regresi linier berganda :

Nilai konstanta sebesar 0,960 yang berarti apabila variabel Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), Pengawasan Preventif (PP), dan Pengawasan Detektif (PD) = 0, maka Efektivitas Pengendalian Anggaran (EPA) sebesar 0,960.

Hasil Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 0,124. Yang menunjukkan hubungan arah positif (satu arah) antara Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dengan Efektivitas Pengendalian Anggaran (EPA). Artinya apabila semakin tinggi nilai Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) maka Efektivitas Pengendalian Anggaran (EPA) tersebut semakin tinggi dan sebaliknya.

Hasil Pengawasan Preventif (PP) mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 0,275. Yang menunjukkan hubungan arah positif (searah). Artinya apabila variabel Pengawasan Preventif (PP) naik maka diikuti oleh Efektivitas Pengendalian Anggaran (EPA).

Hasil Pengawasan Detektif (PD) mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 0,290. Yang menunjukkan hubungan arah positif (searah). Yang menunjukkan apabila variabel Pengawasan Detektif (PD) semakin naik maka diikuti kenaikan oleh Efektivitas Pengendalian Anggaran (EPA).

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebas memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel terikat. Uji F digunakan untuk menguji kelayakan model dengan tujuan untuk mengetahui apakah mungkin terdapat pengaruh yang signifikan pada model penelitian yang layak digunakan. Kelayakan model yang diuji menghasilkan dengan menggunakan α sebesar 5%. Berikut dapat dilihat hasil dari uji kelayakan model (Uji F) pada perhitungan statistik dibawah ini:

Tabel 8
Hasil Uji F

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8,117	3	2,706	24,016	.000 ^b
	Residual	13,632	121	0,113		
	Total	21,748	124			

a. Dependent Variable: EPA

b. Predictors: (Constant), PD, PBK, PP

Sumber: Data Kuesioner diolah, 2021

Berdasarkan pada nilai statistik pada Tabel 8 dapat disimpulkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 24,016 dengan tingkat signifikan 0,000. Maka nilai uji F menunjukkan bahwa nilai pengawasan preventif, pengawasan detektif, dan penganggaran berbasis kinerja memiliki pengaruh bersama-sama terhadap efektivitas pengendalian anggaran pada instansi pemerintah.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu ($0 < R^2 < 1$) memberikan informasi apa yang dibutuhkan untuk memperkirakan variasi variabel dependen. Tabel 9 berikut menyajikan hasil penelitian uji koefisien determinasi (R^2) :

Tabel 9
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,611 ^a	0,373	0,358	0,33565

a. Predictors: (Constant), PD, PBK, PP

b. Dependent Variable: EPA

Sumber: Data Kuesioner diolah, 2021

Dapat dilihat dari hasil uji koefisien determinasi pada perhitungan statistik pada tabel diketahui bahwa besarnya nilai uji koefisien determinasi (R^2) antara Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), Pengawasan Preventif (PP), dan Pengawasan Detektif (PD) terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran (EPA) ditunjukkan oleh nilai R yaitu sebesar 0,373 yang artinya bahwa semua variabel independen memiliki kontribusi sebesar 37,3% terhadap variabel dependen dan sisanya sebesar 62,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diikuti sertakan dalam model.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji tingkat signifikan pengaruh antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan variabel lain yang dianggap konstan. Apabila penelitian ini nilai signifikan kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen,

dan apabila nilai signifikan lebih dari 0,05 maka tidak ada pengaruh yang signifikan. Berikut dapat dilihat hasil uji statistik (Uji t) pada perhitungan statistik dibawah ini :

Tabel 10
Hasil Uji T

	Model	t	Sig.	α	Keterangan
1	(Constant)	2,991	,003		
	PBK	1,833	,069	0,05	Tidak Signifikan
	PP	3,694	,000	0,05	Signifikan
	PD	4,362	,000	0,05	Signifikan

Sumber: Data Kuesioner diolah, 2021

Berdasarkan pada Tabel 10, menunjukkan bahwa hasil uji t dengan perumusan hipotesis sebagai berikut :

Pengujian Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran (EPA). Dalam hipotesis yang pertama menguji pengaruh penganggaran berbasis kinerja (PBK) terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran (EPA). Hasil pada Tabel 10, menunjukkan jika nilai signifikan sebesar 0,069 atau lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H_1 ditolak. Yang berarti Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran (EPA) pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya.

Pengawasan Preventif (PP) terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran (EPA). Dalam hipotesis yang pertama menguji pengaruh pengawasan preventif (PP) terhadap efektivitas pengendalian anggaran (EPA). Hasil pada Tabel 10, menunjukkan jika nilai signifikan sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima. Yang berarti Pengawasan Preventif (PP) berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran (EPA) pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya.

Pengawasan Detektif (PD) terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran (EPA). Dalam hipotesis yang pertama menguji pengaruh Pengawasan Detektif (PD) terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran (EPA). Hasil pada Tabel 10, menunjukkan jika nilai signifikan sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H_3 diterima. Yang berarti Pengawasan Detektif (PD) berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran (EPA) pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya.

Pembahasan

Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran

Menurut Mardiasmo (2002:93), anggaran berbasis kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran publik.

Berdasarkan dari hasil uji hipotesis t bahwa penganggaran berbasis kinerja tidak berpengaruh atau tidak signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran, sehingga (H_1) ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa kurang sesuai penyusunan anggaran berbasis kinerja dengan visi, misi, serta rencana strategis atau tujuan dari instansi tersebut yang sudah ditetapkan. Apabila semakin baiknya penyusunan anggaran berbasis kinerja yang sesuai dengan visi, misi serta tujuan maka akan semakin tinggi pula efektivitas pengendalian anggaran.

Penolakan hipotesis ini tidak sejalan dengan pendapat Bastian (2006:171). Bahwa dalam penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu sistem penganggaran yang

berorientasi pada *output* organisasi serta berkaitan erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi.

Dalam hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2014) bahwa penganggaran berbasis kinerja tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian anggaran pada SKPD Kabupaten Pelalawan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2016) mengatakan bahwa penganggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian anggaran pada SKPD Kabupaten Grobogan.

Pengaruh Pengawasan Preventif terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran

Pengawasan preventif mempunyai tujuan utama yaitu untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang dari dasar yang preventif dilakukan pengawasan agar tidak terjadinya hal-hal diluar perencanaan. Yang kedua, menentukan sasaran dan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi. Ketiga, menentukan kewenangan dan tanggung jawab sebagai instansi sehubungan dengan tugas yang harus dilaksanakan dan yang terakhir adalah memberikan pedoman bagi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan yang efektif (Baswir, 2000:123).

Berdasarkan hasil dari uji hipotesis t bahwa pengawasan preventif berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran, sehingga (H_2) diterima. Pengawasan preventif berhasil meningkatkan efektivitas pengendalian anggaran karena unit pengawas telah melaksanakan pengawasan preventif sesuai dengan prosedur pengawasan yang telah ditetapkan.

Hipotesis diterima sesuai dengan teori Revrisond (2000:13) yang mengemukakan bahwa pengawasan preventif pada dasarnya dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam kegiatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin baik unit pengawasan melaksanakan pengawasan preventif maka semakin tinggi efektivitas pengendalian anggaran, sebaliknya semakin kurang baik unit pengawasan melaksanakan pengawasan preventif maka semakin rendah efektivitas pengendalian anggaran

Dalam hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fuadi (2013) yang menunjukkan bahwa pengawasan preventif berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian anggaran pada SKPD di Kota Bukit tinggi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2016) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh dari pengawasan preventif terhadap efektivitas pengendalian anggaran pada SKPD Kabupaten Grobogan.

Pengaruh Pengawasan Detektif terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran

Pengawasan detektif merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi suatu dokumen laporan pertanggungjawaban, yang biasanya disusun setelah selesai dilaksanakannya suatu kegiatan tersebut (Baswir, 2000:13). Pengawasan detektif juga menyiapkan orang-orang yang terlibat dalam proses pengendalian anggaran agar mereka selalu waspada akan timbulnya suatu permasalahan (Porter, 1992:177).

Berdasarkan hasil dari uji hipotesis t bahwa pengawasan detektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran, sehingga (H_3) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin teliti unit pengawas dalam mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban bendaharawan maka tidak akan menimbulkan suatu permasalahan sehingga semakin tinggi tingkat efektivitas pengendalian anggaran.

Hipotesis diterima sesuai dengan teori Revrisond (2000:13) yang mengemukakan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban yang biasanya dilakukan setelah adanya suatu kegiatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin baik unit pengawasan melaksanakan pengawasan detektif maka semakin tinggi efektivitas pengendalian anggaran, sebaliknya

semakin kurang baik unit pengawasan melaksanakan pengawasan detektif maka semakin rendah efektivitas pengendalian anggaran.

Dalam hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Baskara (2017) yang menunjukkan bahwa pengawasan detektif berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran pada SKPD di Kota Dumai.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), Pengawasan Preventif (PP), dan Pengawasan Detektif (PD) terhadap Efektivitas Pengendalian Kinerja (EPA). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan membagikan kuisisioner pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian sebagai berikut : (1) Penganggaran berbasis kinerja tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa kurang sesuainya penyusunan anggaran berbasis kinerja dengan visi, misi, serta rencana strategis atau tujuan dari instansi tersebut yang sudah ditetapkan; (2) Pengawasan preventif tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian anggaran. Karena semakin baik unit pengawasan melaksanakan pengawasan preventif maka semakin tinggi efektivitas pengendalian anggaran, sebaliknya semakin kurang baik unit pengawasan melaksanakan pengawasan detektif maka semakin rendah efektivitas pengendalian anggaran.; (3) Pengawasan detektif berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik unit pengawasan melaksanakan pengawasan detektif maka semakin tinggi efektivitas pengendalian anggaran.

Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian tentang penganggaran berbasis kinerja, pengawasan preventif, dan pengawasan detektif terhadap efektivitas pengendalian anggaran di Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya, maka saran yang dapat diambil sebagai berikut : (1) Peneliti selanjutnya sebaiknya tidak hanya menggunakan metode survey dengan menyebarkan kuisisioner, dapat juga menambahkan dengan adanya metode wawancara secara langsung. Agar peneliti dapat melihat langsung bagaimana responden dalam memberikan jawaban, (2) Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan lingkup penelitian dengan menambahkan jumlah obyek yang lebih banyak. Misalkan menambahkan lingkup pada kecamatan, (3) Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya diharapkan dapat meningkatkan penganggaran berbasis kinerja yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam sistem penganggaran. Sehingga dapat tercapainya efektivitas pengendalian anggaran sesuai dengan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Baskara, B.Y. 2017. Pengaruh Pengawasan Preventif, Pengawasan Detektif dan Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Dumai). *Jurnal Online Mahasiswa* (4)1. Fakultas Ekonomi. Universitas Riau. Pekanbaru.
- Bastian, 1. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga. Jakarta
- Baswir, R. 2000. *Koperasi Indonesia. Edisi Pertama*. Cetakan Pertama. BPFE. Yogyakarta.
- BPKP, 2005. *Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi)*. Jakarta.
- Fuadi, A. 2013. Pengaruh Pengawasan Preventif dan Pengawasan Detektif Terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bukittinggi). *Jurnal Akuntansi*, 1 (1). Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Padang.

- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23* (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. (9th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ichsan, Randhy. 2013. "Teori Keagenan (Agency Theory)." 12 Januari. <https://bungrandhy.wordpress.com/2013/01/12/teori-keagenan-agencytheory/>. Diakses tanggal 15 Oktober 2020
- Nugroho, L.S. 2016 Pengaruh Pengawasan Preventif, Pengawasan Detektif dan Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Grobongan). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah. Surakarta
- Jensen dan Meckling. 1976. *The Theory of The Firm: Manajerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Sructure*, *Journal of Pnancial and Economics*. 3:305-360.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2011. *Peningkatan Penerapan Intern di lingkungan Kementerian Keuangan*. Jakarta.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Munandar, M. 2001. *Budgeting*. BPFE. Yogyakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001. *Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008. *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 1ahun 2005. *Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Porter, Thomas, 1992. *EDP Pengendalian dan Auditing*. Jakarta : Erlangga.
- Pratama, D. 2014. Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja, Pengawasan Preventif Dan Pengawasan Detektif Terhadap Erektifitas Pengendalian Anggaran (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pelalawan). *Jurnal Online Mahasiswa* 1(2). Fakultas Ekonomi, Universitas Riau.
- Revrisond. (2000). *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta:BPFE
- Sekaran, U. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Edisi keempat. Buku 2. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- _____. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kombinasi*. Alfabeta. Bandung.
- _____. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Supriyono. 1990. *Pemeriksaan manajemen dan pengawasan pemerintahan Indonesia*. BPFE. Yogyakarta.
- Widjaja, G. 2002. *Pengelolaan Harta Kekayaaan Negara*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- _____. 2004. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.